

## COVID-19 PANDEMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE

Lambok Nababan<sup>1)</sup>, Moh. Ali Al Kafit<sup>2)</sup>, dan Fadhoilus Shofi<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Tuban  
Jawa Timur

<sup>2)</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Tuban  
Jawa Timur

<sup>3)</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Tuban  
Jawa Timur

e-mail: [lamboknababan29@gmail.com](mailto:lamboknababan29@gmail.com)<sup>1)</sup>, [moh.alialkafit@gmail.com](mailto:moh.alialkafit@gmail.com)<sup>2)</sup>, [fadhoilusshofi@gmail.com](mailto:fadhoilusshofi@gmail.com)<sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Sektor keuangan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah, telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi. Bali merupakan suatu destinasi pariwisata terkenal yang pernah menghadapi tantangan besar sebagai akibat dari penurunan ekonomi global dan lokal yang dipicu oleh pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali. Penelitian ini melihat perubahan dalam pendapatan, belanja, rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Metode kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data keuangan di daerah provinsi Bali. Rasio keuangan termasuk pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, efisiensi penerimaan PAD, efisiensi pemungutan PAD, dan rasio aktivitas. Penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi akademisi, bisnis, dan pembuat kebijakan diantaranya memahami dampak ekonomi yang lebih dalam penyusunan kebijakan, perencanaan bisnis dan strategi keuangan, analisis risiko, dan mengevaluasi efek intervensi pemerintah adalah beberapa manfaat dari penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor keuangan dan ekonomi serta bagaimana menghadapi masalah serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pandemi berdampak pada struktur keuangan daerah.

**Kata kunci** : Pandemi, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan.

### ABSTRACT

*The financial sector, particularly at the local government level, has undergone major changes as a result of the COVID-19 pandemic. Bali is a well-known tourism destination that has faced major challenges as a result of the global and local economic downturn triggered by the pandemic. This study aims to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on the financial performance of the local government of Bali Province. This study looks at changes in revenue, expenditure, self-reliance ratio, effectiveness, efficiency, and financial activity that occurred during the COVID-19 pandemic. The descriptive quantitative method was used in this study to analyse financial data in the Bali province. Financial ratios include revenue growth, self-reliance ratio, PAD revenue efficiency, PAD collection efficiency, and activity ratio. This research is also very useful for academics, businesses, and policy makers including understanding more economic impacts in policy making, business planning and financial strategies, risk analysis, and evaluating the effects of government interventions are some of the benefits of this research. Overall, this research provides a clearer picture of how the COVID-19 pandemic has affected the financial sector and economy and how to deal with similar issues in the future. As such, this research is expected to provide deep insights into how the pandemic impacts the financial structure of the region.*

**Keywords**: *Pandemic, Financial Performance, Financial Ratio.*

## 1. Pendahuluan

Provinsi Bali telah mengalami dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19, terutama pada sektor pariwisata, yang merupakan pilar ekonominya. Akibat pembatasan perjalanan dan penutupan destinasi wisata, kunjungan ke Bali pada bulan April 2020 menurun drastis hingga 93,2%. Sejak akhir tahun 2019, pandemi COVID-19 telah melanda dunia, memengaruhi banyak sektor ekonomi, termasuk kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan di berbagai industri menghadapi tantangan besar karena pembatasan sosial, penutupan bisnis, dan penurunan daya beli masyarakat. Ketika banyak bisnis tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak ini, mereka mengalami penurunan pendapatan, masalah dalam rantai pasokan, atau kebangkrutan. Laporan McKinsey & Company (2020) menyatakan bahwa dampak pandemi terhadap kinerja keuangan perusahaan bervariasi tergantung pada sektor industri. Sektor yang paling terkena dampak negatif adalah pariwisata, penerbangan, dan perhotelan, sementara sektor e-commerce dan teknologi justru menghasilkan lebih banyak uang. Menurut penelitian PwC (2021), bisnis dengan tingkat digitalisasi yang lebih tinggi lebih mungkin bertahan dan menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil selama pandemi. Dalam laporan keuangan, banyak bisnis menunjukkan penurunan pendapatan, laba bersih, dan arus kas operasional, yang menunjukkan dampak ini. Analisis World Bank (2021) menunjukkan bahwa banyak bisnis kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang menghadapi tantangan likuiditas akut. Akibatnya, mereka membutuhkan restrukturisasi utang dan bantuan keuangan untuk bertahan. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam hal profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan selama masa krisis dan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan bisnis. Perekonomian dunia, termasuk Indonesia, telah sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Pasar global terganggu, investasi asing menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga mengubah ekonomi dan keuangan, memaksa pemerintah daerah Provinsi Bali untuk mengubah strategi dan kebijakan fiskalnya. Angka pengangguran di Indonesia meningkat dari 5,28 persen pada tahun 2019 menjadi 7,07 persen pada tahun 2020. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 turun tajam dari 5,02 persen menjadi 2,97 persen, menurut data Bank Dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah Provinsi Bali, yang merupakan bagian dari ekonomi nasional yang sangat bergantung pada industri pariwisata, menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan.

Dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 tercatat sebesar 2,97%. Akibat peningkatan kasus Covid-19 pada bulan Juni, ketika 168.780 orang terkonfirmasi positif (WHO, 2020), Kuartal II mengalami penurunan yang signifikan mencapai -5.32%. Sebagai tanggapan, pemerintah segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta mulai April 2020. Kuartal ketiga menunjukkan pertumbuhan -3,49%, yang mempertahankan tren negatif (Venni et al., 2023). Di sisi lain, kuartal keempat menunjukkan peningkatan -2,17%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 0,69% pada kuartal pertama tahun 2021. Namun, pada kuartal kedua tahun 2021, pertumbuhannya mencapai 7,08 persen, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi selama pandemi, didorong oleh peningkatan sektor bisnis dan transportasi (Badan Pusat Statistik, 2021). Kuartal ketiga tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang

positif sebesar 5,03%. Di sisi lain, kuartal keempat tahun 2021 mencatat pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 3,53% sebagai akibat dari penyebaran varian delta Covid-19.

Menurut (Puspita & Pangastuti, 2022), laporan keuangan dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kebutuhannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi dengan menganalisis berbagai rasio keuangannya, yang pada gilirannya menunjukkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. (Fajria et al., 2021) menemukan bahwa pandemi COVID-19 secara signifikan berdampak pada kinerja ekonomi Bali. Pada triwulan keempat tahun 2020, ekonomi Bali mengalami penurunan sebesar 12,21%, meskipun ada sedikit perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh lockdown dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan di beberapa negara, yang menghambat kunjungan wisatawan asing ke Bali (wisman), sehingga menekan sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) selama libur Natal dan tahun baru adalah faktor utama dalam peningkatan ekonomi Bali. Pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri menunjukkan pemulihan ekonomi Bali. Secara keseluruhan, ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar 9,31% pada tahun 2020, kurang dari peningkatan yang positif pada 2019. Kebijakan pembatasan perjalanan sejak Maret 2020 mengurangi kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota Provinsi Bali, meskipun pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Sebagaimana ditunjukkan oleh contoh kabupaten dan kota di Bali di atas, pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ekonomi makro, dan peran Pemerintah sebagai regulator kebijakan dan pembuat undang-undang memiliki dampak yang signifikan. Sebagai tanggapan atas situasi ini, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 1999. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 dan No. 34 pada tahun 2004. Tanpa menciptakan delegasi, kedua undang-undang tersebut menekankan kewenangan daerah tanpa menciptakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini mencakup pengaturan dan upaya untuk mencapai perimbangan keuangan vertikal antara pusat dan daerah dengan tujuan membiayai tugas yang menjadi tanggung jawab daerah (Fajria et al., 2021). Pandemi ini mengubah gaya hidup masyarakat dan membatasi ekonomi. Produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia dipengaruhi secara langsung oleh protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bali, yang dikenal sebagai tempat wisata populer, kini menjadi salah satu yang paling terkena dampak. Industri pariwisata menghasilkan sebagian besar pendapatan daerah, karena sebagian besar pengunjung berasal dari luar negeri. Penurunan jumlah turis, pembatasan perjalanan, dan penutupan tempat wisata telah merusak sektor pariwisata Bali, yang sangat tergantung pada wisatawan asing sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Penulis mencoba menganalisis laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali dengan membaginya ke dalam empat tahap penting. Tahun 2019 menunjukkan situasi sebelum pandemi COVID-19, tahun 2020 menunjukkan masa pandemi, tahun 2021 menandai fase transisi, dan tahun 2022 menunjukkan masa setelah pandemi. Diharapkan bahwa keempat tahap ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pandemi mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali. Ini akan memungkinkan untuk menemukan perubahan besar dalam laporan keuangan selama periode tersebut. Kami menganalisis rasio keuangan dari semua kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Penelitian ini lebih menekankan pada daerah yang mengalami penurunan yang signifikan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan di Provinsi Bali. Dengan memusatkan analisis kami pada kabupaten-

kabupaten ini, kami dapat menggambarkan dengan lebih detail dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai aspek keuangan, seperti pendapatan, belanja, rasio kemandirian, efektivitas, Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang kesulitan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak: pemilik (pemilik) dan manajemen (agen). Menurut teori agensi, jika ada perbedaan antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal, maka akan ada masalah agensi karena masing-masing pihak akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria, 2011). Meskipun demikian, karena perusahaan semakin besar, seringkali terjadi konflik antara pemilik dan manajemen. Investor, yang dikenal sebagai pemegang saham, dan manajemen, yang dikenal sebagai direktur, adalah kedua belah pihak. Ada kemungkinan konflik keagenan antara manajemen (agen) dan prinsipal karena agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal dan agen sama-sama menghindari risiko dan menginginkan keuntungan yang besar (Astria, 2011).

Pemerintah daerah Indonesia mengalami perubahan besar dalam cara mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sejak era otonomi daerah dimulai pada tahun 1999. Teori keagenan, atau teori keagenan, mulai digunakan bersamaan dengan perubahan ini sebagai kerangka konseptual untuk mengatur hubungan antara pemegang kebijakan dan pihak yang diwakili. Tujuan dari tinjauan teori ini adalah untuk mempelajari bagaimana konsep keagenan diterapkan dalam konteks otonomi daerah, dengan penekanan khusus pada hubungan antara legislatif dan eksekutif serta antara legislatif dan rakyat (Yulianti et al., 2023). Teori keagenan pertama kali diusulkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, dan merupakan kerangka kerja yang melibatkan hubungan antara pemilik dan agen yang bertindak atas nama pemilik. Pemilik dalam otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai rakyat yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mewakili kepentingan mereka.

Teori ini menawarkan model analitis yang dapat membantu memahami konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Zaki et al., 2023). Dua perspektif utama muncul dari pemanfaatan teori keagenan dalam konteks otonomi daerah. Pertama, kita dapat menggunakan teori ini untuk memahami bagaimana legislatif dan eksekutif berinteraksi dalam pemerintahan daerah. Hubungan ini menunjukkan perubahan antara dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai legislatif dan gubernur atau kepala daerah sebagai eksekutif. Pandangan pertama menekankan dinamika prinsipal-agensial, di mana eksekutif bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan program yang menguntungkan rakyat. Gubernur atau kepala daerah bertindak sebagai agen utama yang bertanggung jawab kepada pemilik kebijakan, yaitu rakyat. Teori keagenan dapat membantu menganalisis bagaimana insentif, kontrol, dan tanggung jawab diatur untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi bagian terpenting dari pengambilan keputusan di tingkat eksekutif.

Hubungan antara legislatif dan rakyat merupakan perspektif kedua ketika teori keagenan diterapkan pada konteks otonomi daerah. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan wakil

rakyat. DPRD berfungsi sebagai agen yang mewakili rakyat sebagai principal dalam teori keagenan (Wardoyo et al., 2022). Dalam tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya memenuhi kepentingan politik dan individu, tetapi juga memenuhi kebutuhan umum rakyat. Untuk memastikan bahwa DPRD bertanggung jawab secara efektif kepada rakyat, teori keagenan dapat digunakan untuk melihat bagaimana mekanisme insentif dan kontrol diatur dalam konteks ini. Dalam hal penerapan teori keagenan dalam konteks otonomi daerah, ada beberapa kesulitan. Namun, teori ini menawarkan perspektif yang mendalam tentang hubungan agen-prinsipal. Kompleksitas dan beragam kepentingan yang harus diakomodasi oleh agen eksekutif dan legislatif merupakan masalah utama. Dalam situasi seperti ini, kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban sangat penting untuk menjaga kepentingan yang beragam dalam keseimbangan. Menurut Maria et al. (2021), penerapan teori keagenan dalam otonomi daerah juga berdampak pada seberapa efektif pengelolaan pemerintahan daerah dan kualitas pengambilan keputusan. Mekanisme insentif yang tepat dapat mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sementara kontrol yang baik dapat mencegah perilaku agen yang tidak diinginkan. Dalam konteks otonomi daerah, analisis teori keagenan menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara legislatif, eksekutif, dan rakyat. Penerapan teori keagenan memberikan kerangka konseptual yang bermanfaat untuk menganalisis dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah karena memahami dinamika antara prinsipal dan agen. Meskipun ada kesulitan dan kesulitan dalam menerapkan teori keagenan, manfaatnya dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah mendorong kita untuk terus menggunakan teori keagenan sebagai pedoman dalam konteks otonomi daerah Indonesia.

Pengawasan keuangan pemerintahan daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Analisis rasio keuangan membantu memahami kesehatan keuangan pemerintah daerah dan menemukan kekuatan, kelemahan, dan peluang risiko. Dalam analisis ini, beberapa rasio keuangan penting digunakan. Ini termasuk Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Coverage Debt Service (Zulkarnain, 2020).

### **Rasio Kemandirian:**

Rasio kemandirian adalah salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu entitas, baik pemerintah daerah maupun organisasi non-profit, dalam membiayai kegiatan operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat otonomi finansial suatu entitas, yang penting untuk menilai keberlanjutan operasionalnya. Menurut literatur keuangan daerah, rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan pendapatan daerah secara keseluruhan. Tingkat kemandirian yang tinggi dapat membantu pemerintah daerah beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional (Awani & Hariani, 2021). Rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

**Tabel 1.** Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Intruktif
Rendah	25-50	Konsulatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Amal & Wibowo (2022)

**Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah:**

Dalam rasio ini, ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas diukur dengan mengetahui seberapa baik pendapatan asli dapat memenuhi persyaratan pembangunan dan mendukungnya. Sementara efisiensi diukur dengan melihat biaya pengumpulan dan administrasi pendapatan. Analisis menyeluruh rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menggunakan sumber daya lokal untuk mencapai tujuan pembangunan. (Moridu, 2021). Rasio Efektivitas dengan rumus sebagai berikut adalah:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah\ PAD}{Anggaran\ Pendapatan\ Asli\ Daerah\ PAD}$$

**Tabel 2.** Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan Daerah	Kategori
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Under 60%	Tidak Efektif

Sumber: Amal & Wibowo (2022)

Rasio efisiensi belanja daerah adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mengelola anggaran dengan cara yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan atau rasio ini dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam menggunakan dana yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rasio efisiensi adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas atau proses dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam keuangan, rasio efisiensi biasanya melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan jumlah sumber daya yang digunakan.. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi :

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Total\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Total\ Pendapatan\ Daerah}$$

**Tabel 3.** Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Kategori
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Under 60%	Sangat Efisien

Sumber: Amal & Wibowo (2022)

### Rasio Aktivitas:

Pendapatan, belanja, dan investasi adalah beberapa elemen ekonomi penting yang diukur dengan ukuran kuantitatif yang disebut rasio ekonomi. Rasio ekonomi memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur tentang performa ekonomi suatu entitas, seperti perusahaan, negara, atau wilayah, dengan membandingkan berbagai variabel ekonomi dan membantu dalam menganalisis efisiensi, produktivitas, dan stabilitas ekonomi. Rasio ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti rasio keuangan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran, yang semuanya memberikan informasi penting bagi para pengambil keputusan. Rasio ekonomi, sebagai alat evaluasi yang sangat penting, sering digunakan dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan ekonomi yang optimal (Aribowo et al., 2023). Rasio aktivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}}$$

### Rasio Pertumbuhan:

Rasio pertumbuhan menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah berkembang dari waktu ke waktu. Rasio ini, menurut literatur keuangan daerah, dapat mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah, dan surplus atau defisit anggaran. Analisis rasio pertumbuhan menunjukkan stabilitas ekonomi dan peluang pembangunan lokal (Aini et al., 2023). Rumus rasio pertumbuhan adalah:

$$\text{Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{(\text{Total Pendapatan } t1 - \text{Total Pendapatan } t - 1)}{\text{Total Pendapatan } t - 1}$$

$$\text{Pertumbuhan Total Belanja} = \frac{(\text{Total Belanja } t1 - \text{Total Belanja } t - 1)}{\text{Total Belanja } t - 1}$$

Untuk menerapkan analisis rasio keuangan pada pemerintahan daerah, sangat penting untuk memahami konteks, undang-undang, dan kondisi ekonomi lokal. Keseluruhan, literatur tentang analisis rasio keuangan pada pemerintahan daerah memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengukur dan meningkatkan kinerja keuangan entitas tersebut. Penerapan analisis rasio ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebijakan fiskal, pembangunan, dan pelayanan publik.

### **Penilaian Kinerja Keuangan dan Tujuan Pengukuran**

Kinerja keuangan adalah kinerja manajemen, yang didefinisikan sebagai peningkatan nilai keuangan dan perkiraan manfaatnya. Memperkirakan penanda keuangan sangat penting untuk memberi mitra pemahaman tentang status operasional dan pencapaian bisnis. Kinerja perusahaan adalah ukuran yang tepat yang diambil oleh perusahaan untuk menilai kelayakan dan kecukupan latihan yang dilakukan selama waktu tertentu. Perusahaan dapat memperkirakan presentasinya dengan menghasilkan keuntungan dan kewajiban jangka panjang, menghasilkan manfaat dari sumber dayanya, dan membiayai latihan. Handayani (2013:6) menyimpulkan bahwa kinerja adalah gambaran suatu tingkatan untuk menyelesaikan kegiatan, program, atau pendekatan untuk memahami tujuan, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja dimasukkan ke dalam penyempurnaan rencana strategis perusahaan (*strategic plan*). Kinerja keuangan adalah kemanfaatan kerja, menurut Kurniasari (2014:12). Area keuangan perusahaan dilakukan sendiri dan ditampilkan dalam laporan anggaran. Kinerja keuangan menyiratkan apa yang akan terjadi atau pencapaian yang telah dicapai oleh suatu perusahaan para manajemen dalam melakukan kapasitasnya dalam mengawasi sumber daya perusahaan secara memadai selama periode tertentu, Rudianto (2012).

Selain itu, penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan untuk melacak kemajuan implementasi strategi organisasi. Alat yang dapat memberikan pandangan menyeluruh terhadap pencapaian tujuan strategis diperlukan oleh organisasi untuk menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah. Dikombinasikan dengan pengukuran non-keuangan seperti efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan inovasi produk, rasio keuangan konvensional memberikan gambaran yang lengkap dan seimbang tentang kinerja organisasi. Manajemen dapat menggunakan pengukuran ini untuk menentukan area strategis mana yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satu cara untuk mencapai pemenuhan adalah melalui penilaian kinerja, yang didasarkan pada kemampuan rasional individu dan kolektif. Di sini, penilaian kinerja tidak hanya digunakan untuk menilai, tetapi juga untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada tim atau individu yang telah mencapai atau melampaui target kinerja. Pemenuhan seperti ini dapat mencakup peningkatan gaji, bonus, promosi, atau pengakuan formal lainnya yang dapat membuat karyawan lebih terlibat dan termotivasi. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan loyalitas karyawan, dan meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan pencapaian kinerja (Putra et al., 2021). Perubahan dalam penilaian kinerja menunjukkan bahwa metode konvensional yang hanya berfokus pada aspek keuangan berkembang menjadi metode yang lebih holistik. Perubahan ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan organisasi tidak hanya diukur dari sudut pandang finansial tetapi juga dari sudut pandang manusia dan sosial. Akibatnya, penerapan sistem penilaian kinerja yang holistik dan berorientasi ke depan semakin dianggap penting dalam manajemen organisasi kontemporer. Penilaian kinerja dapat menjadi daya ungkit yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi di era dinamika bisnis yang terus berubah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan karyawan serta memastikan bahwa penilaian kinerja terkait dengan tujuan

strategis organisasi. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Menurut Mardiasmo (2002:121), tujuan dari pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah untuk mencapai tiga tujuan: 1. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan membantu pemerintah berkonsentrasi pada tujuan dan sasaran program unit kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 2. Mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan.

### **3. Metode Penelitian**

Pendekatan kuantitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang ada dengan menggunakan data numerik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja keuangan Provinsi Bali. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan dan perubahan dalam indikator keuangan selama pandemi (Sugiyono, 2018). Data keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan diperoleh dari laporan keuangan resmi yang mencakup periode sebelum, selama, dan setelah pandemi. Analisis statistik deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan perubahan tersebut dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya.

Penelitian ini akan menggunakan kedua jenis data, yaitu data skunder dan data primer. Data skunder akan berasal dari laporan keuangan resmi Pemerintah Daerah Provinsi Bali, yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sumber data primer akan berasal dari artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan pemerintah daerah. Sumber data primer ini akan memberikan konteks dan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah (Sugiyono, 2017).

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1. Rasio Pertumbuhan**

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 sebelum pandemi, ekonomi Bali tumbuh positif dengan laju pertumbuhan sekitar 5,60%. Tahun 2020: Pariwisata, pilar ekonomi Bali, mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19. Provinsi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 3,58% pada tahun 2021, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah tahun sebelumnya yang sulit. Meskipun pertumbuhan tetap positif, tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang sedikit lebih rendah sebesar -0,31%, yang dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memperbaiki rencana keuangan mereka. Tahun 2021–2022 selama periode ini, ekonomi Bali berangsur-angsur pulih karena pandemi dan pembatasan sosial yang lebih ringan. Namun, industri pariwisata masih belum sepenuhnya pulih dalam beberapa tahun ke depan. Tahun 2023 Ekonomi Bali menunjukkan pemulihan yang signifikan dengan pertumbuhan 5,71%, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan tahun 2019. Industri seperti digitalisasi dan jasa membantu pemulihan ekonomi, meskipun jumlah turis asing belum sepenuhnya pulih. Keuangan Pemerintah Daerah: APBD 2023: Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pendapatan direncanakan sebesar Rp7,24 triliun dan belanja sebesar Rp7,93 triliun, yang menunjukkan defisit anggaran. Realisasi pendapatan tercatat 93,39% dari anggaran dan belanja terealisasi 83,29%. Realisasi Anggaran 2023: Anggaran tahun 2023 menunjukkan defisit sebesar Rp1,9 triliun, dengan pendapatan daerah terealisasi Meskipun terdapat defisit yang

perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan ke depan, keuangan pemerintah daerah juga menunjukkan upaya dalam mengelola anggaran.

#### **4.2. Rasio Pertumbuhan Total Belanja**

Dalam tahun anggaran tertentu atau selama periode anggaran, rasio pertumbuhan bermanfaat untuk menentukan apakah pemerintah daerah mengalami peningkatan pendapatan atau belanja selama periode anggaran baik negatif maupun positif (Mahmudi, 2010). Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui bagaimana pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran telah meningkat, kita dapat menilai prospek mana yang harus dipertimbangkan (Ulum, 2009). Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah informasi mengenai rasio pertumbuhan total belanja daerah Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2023: Tahun 2019: Belanja daerah Provinsi Bali tercatat sebesar Rp1.462.190,77 miliar. Tahun 2020: Belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp994.176,79 miliar, yang merupakan penurunan sekitar 32% dibandingkan tahun 2019. Tahun 2021: Belanja daerah meningkat menjadi Rp1.462.190,77 miliar, kembali ke level yang sama seperti tahun 2019. Tahun 2022: Belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp994.176,79 miliar, serupa dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2020. Tahun 2023: Belanja daerah diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun. Perlu dicatat bahwa fluktuasi belanja daerah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan pendapatan daerah, prioritas belanja, dan kondisi ekonomi makro. Untuk analisis yang lebih mendalam, disarankan untuk merujuk pada dokumen resmi APBD Provinsi Bali atau laporan keuangan pemerintah daerah terkait. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 secara umum berdampak negatif pada semua daerah di Provinsi Bali, terutama pada pendapatan. Beberapa wilayah pulih dengan cepat, seperti Gianyar, dan mencatat pertumbuhan positif yang signifikan pada tahun 2022. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini, penting bagi daerah tersebut untuk terus mengoptimalkan kebijakan fiskal mereka, termasuk bagaimana anggaran didistribusikan, untuk memitigasi risiko dan mendukung pemulihan ekonomi. Menurut analisis ini (Dewantara & Nufitasari, 2021), dampak pandemi terhadap kinerja keuangan daerah dapat sangat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan pemulihan yang diambil pemerintah daerah masing-masing.

#### **4.3 Rasio Kemandirian**

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah, ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian menunjukkan seberapa bergantung daerah pada dana ekstern. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih bergantung pada bantuan dari pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi, dan demikian pula sebaliknya. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa daerah lebih bergantung pada bantuan dari pihak ekstern. Rasio kemandirian juga menunjukkan seberapa banyak masyarakat terlibat dalam pembangunan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (Halim dan Kusufi, 2012: L-6). Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah rasio kemandirian Provinsi Bali pada tahun 2021: Pemerintah Daerah Realisasi

PAD (Rp Juta) Realisasi Pendapatan Transfer (Rp Juta) Rasio Kemandirian (%)  
Klasifikasi Kemandirian.

Tabel 4. Rasio Kemandirian

Pemerintah Daerah	Realisasi PAD (Rp Juta)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp Juta)	RKKD (%)	Klasifikasi Kemandirian
Provinsi Bali	3.117.070,01	2.801.186,28	111,28	Tinggi
Kota Denpasar	792.361,91	1.115.074,62	71,06	Sedang
Kab. Badung	1.750.345,23	866.887,04	201,91	Tinggi
Kab. Gianyar	430.172,11	1.069.631,88	40,22	Rendah
Kab. Tabanan	362.314,63	1.371.746,82	26,41	Rendah
Kab. Bangli	163.537,10	949.349,15	17,23	Rendah Sekali
Kab. Jembrana	185.003,04	841.856,18	21,98	Rendah Sekali
Kab. Buleleng	391.988,45	1.574.989,40	24,89	Rendah Sekali
Kab. Karangasem	252.691,75	1.218.932,97	20,73	Rendah Sekali
Kab. Klungkung	254.494,50	853.102,99	29,83	Rendah

Klasifikasi kemandirian berdasarkan rasio kemandirian adalah sebagai berikut: 0% - 25%: Rendah; 25% - 50%: Rendah; 50% - 75%: Sedang; 75% - 100%: Tinggi; 100%: Sangat Tinggi. Berdasarkan data di atas, Provinsi Bali memiliki rasio kemandirian sebesar 111,28%, yang dikategorikan sebagai "Tinggi". Kabupaten Badung memiliki rasio tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya dengan 201,91%, juga termasuk dalam kategori "Tinggi". Sebaliknya, Kabupaten Bangli memiliki rasio terendah dengan 17,23%, yang termasuk dalam kategori "Rendah Sekali". (Widasari & Jahja, 2023), menyatakan bahwa dinamika kemandirian keuangan daerah dapat berubah secara signifikan. Selama tahun 2019-2021, pola hubungan yang lebih partisipatif menunjukkan intervensi atau dukungan dari pemerintah pusat untuk mendukung keuangan Provinsi Bali, yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang hubungan antara hasil penelitian (Widasari & Jahja, 2023) dengan dinamika kemandirian Provinsi Bali usat dalam membentuk pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

#### 4.4 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas keuangan daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan dalam anggaran. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raainaa dan Zahrurrijal (2024), rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Bali selama periode 2019 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi sebagai berikut: 2019: 112,14% (Sangat Efektif); 2020: 81,58% (Kurang Efektif); 2021: 98,13% (Cukup Efektif); 2022: 128,76% (Sangat Efektif). Rata-rata rasio efektivitas selama periode tersebut adalah 105,15%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Efektif". Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi pendapatan daerah secara signifikan. Namun, pada tahun 2022, Provinsi Bali berhasil mencapai rasio efektivitas tertinggi, menunjukkan pemulihan dan peningkatan kinerja keuangan daerah. Selama periode 2019-2022, Provinsi Bali memiliki rasio efektivitas yang dikategorikan sebagai "Sangat Efektif" dengan rata-rata 105,15%. Pada tahun 2019,

Provinsi Bali mencapai 112,14% dari target penerimaan PAD, menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Pada tahun 2020, efektivitas turun menjadi 81,58%, tetapi masih efektif. Efektivitas Badung mengalami variasi yang signifikan: pada tahun 2019, Badung mencapai tingkat efektivitas yang sangat tinggi (71,19%), tetapi mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 (39,92 %) dan pada tahun 2022, Provinsi Bali mencapai tingkat efektivitas tertinggi sebesar 128,76 persen. Pada tahun 2021, efektivitasnya mencapai titik tertinggi sebesar 156,87%, menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk mencapai target penerimaan PAD. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis menjadi 84,90%, yang menimbulkan masalah. Tingkat efektivitas Buleleng cukup stabil sepanjang waktu. Efektivitasnya berkisar antara efektif dan sangat efektif dari 2019 hingga 2022, dengan rata-rata 92,36%. Gianyar menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada 2019 dan 2022, sangat efektif, tetapi pada 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa daerah dapat mencapai atau melebihi target penerimaan PAD; secara keseluruhan, Provinsi Bali dikategorikan sebagai "Sangat Efektif". Tingkat efektivitas yang berbeda di antara pemerintah daerah dapat menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana mereka melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk menemukan peluang perbaikan dan perencanaan kebijakan keuangan yang lebih efisien di masa depan, fluktuasi dan tren efektivitas harus dipantau. Hasil analisis rasio efektivitas kinerja keuangan Provinsi Bali menunjukkan kategori "Sangat Efektif" selama periode 2019–2022. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Primahadi & Kurniawan, 2021) yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah efektif untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Bali secara konsisten berhasil mencapai atau melebihi target penerimaan PAD, seperti yang diukur melalui rasio efektivitas. Ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang mempelajari komponen yang mendukung autonomi keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan daerah berdampak langsung pada tingkat kemandirian keuangan, meskipun detailnya tidak dijelaskan. Penemuan ini relevan dan sejalan dengan penelitian sebelumnya.

#### 4.5 Rasio Efisiensi

Organisasi dapat menemukan area yang dapat dioptimalkan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi pemborosan dengan menggunakan analisis rasio efisiensi. Hasil perhitungan efisiensi kinerja keuangan Provinsi Bali selama periode 2019–2022 menunjukkan rata-rata 107,36%, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik; pada tahun 2019, efisiensi sebesar 98,09%, menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik; pada tahun 2020, efisiensi meningkat menjadi 111,19%, menunjukkan tingkat efisiensi yang signifikan; dan pada tahun 2021, efisiensi meningkat menjadi 105,87%, menunjukkan tingkat efisiensi yang Meskipun ada variasi, Bangli memiliki rata-rata efisiensi 101,53%. Selain itu, Buleleng dan Gianyar mencapai tingkat efisiensi yang baik, dengan rata-rata 99,51% dan 107,41%, masing-masing. Studi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Provinsi Bali dan pemerintah daerah di dalamnya mencapai tingkat efisiensi yang baik dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat efisiensi dengan rata-rata di atas 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dan dapat menjadi indikator untuk mencapai target penerimaan PAD yang lebih baik di Oleh karena itu, temuan dari analisis rasio efisiensi Provinsi Bali dapat membantu penelitian sebelumnya,

memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien.

#### **4.6 Rasio Ekonomi**

Rasio ekonomi provinsi bali selama periode pengamatan dapat memberikan gambaran yang bermanfaat tentang seberapa efektif dan di mana pengeluaran dilakukan oleh provinsi tersebut. Rasio belanja operasi, yang mencerminkan proporsi total dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional, menunjukkan tingkat aktivitas dan keberlanjutan pelayanan publik. Selama periode tersebut, Provinsi Bali memiliki rata-rata rasio belanja operasi 91,69%, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga operasional pemerintahan dan keberlanjutan layanan. Dengan analisis lebih lanjut, Badung menunjukkan variasi tingkat ekonomi yang signifikan; rata-rata rasio belanja operasi sebesar 72,64% menunjukkan bahwa Badung cenderung berkonsentrasi pada operasi daripada belanja modal. Sebaliknya, Bangli dan Buleleng memiliki rasio belanja operasi yang sangat tinggi, masing-masing 90,40% dan 91,18% rata-rata, menunjukkan bahwa mereka sangat memprioritaskan kegiatan operasional. Meskipun peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, Gianyar masih memiliki rasio belanja operasi rata-rata sebesar 78,93%. Meskipun angka ini menunjukkan bahwa perusahaan berkonsentrasi pada operasi, fluktuasi tahun demi tahun menunjukkan bahwa mungkin ada penyesuaian dalam prioritas dan alokasi dana. Rasio belanja modal, yang mengukur berapa banyak uang yang dialokasikan untuk investasi dan pengembangan di daerah, menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Rata-rata rasio belanja modal di Provinsi Bali adalah 8,31%, yang menunjukkan bahwa ada upaya terbatas untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pembangunan daerah. Meskipun rasio belanja modal di Badung sedikit lebih tinggi, rata-rata 27,36%, perlu diperhatikan bahwa perhatian pada belanja modal masih dapat ditingkatkan di seluruh provinsi. Analisis rasio ekonomi ini memberikan perspektif penting tentang kebijakan anggaran dan prioritas pengeluaran Provinsi Bali dan pemerintah daerah di dalamnya. Provinsi dapat mengoptimalkan alokasi dana untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya dengan memahami keseimbangan antara belanja operasi dan modal. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Lantemona et al., 2020), yang menemukan bahwa peningkatan belanja modal dapat berdampak positif pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik di provinsi maupun daerah.

### **5 Kesimpulan**

Studi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperburuk kinerja keuangan Pemerintah Bali. Penurunan Pendapatan Daerah: Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan yang signifikan pada sumber pendapatan daerah Bali, khususnya dari sektor pariwisata. Pembatasan sosial dan penutupan sektor pariwisata menyebabkan penurunan tajam dalam PAD (pendapatan asli daerah), terutama pajak hotel dan rumah makan. Peningkatan Belanja untuk Penanganan Pandemi: Untuk menangani dampak pandemi, pemerintah Provinsi Bali membelanjakan lebih banyak uang untuk bantuan sosial, stimulus ekonomi, dan sektor kesehatan. Ini menyebabkan defisit anggaran yang lebih besar karena pendapatan daerah menurun drastis sementara belanja meningkat. Perubahan Prioritas Anggaran: Pemerintah mengalihkan perhatian anggaran dari proyek pembangunan infrastruktur ke sektor kesehatan dan pemulihan sosial-ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Ini mengakibatkan penundaan atau pengurangan anggaran untuk beberapa program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak pada Rasio Keuangan Daerah: Akibat pengurangan pendapatan dan peningkatan

anggaran untuk penanggulangan pandemi, rasio keuangan daerah terpengaruh, termasuk peningkatan rasio belanja terhadap pendapatan dan penurunan rasio kemampuan fiskal daerah. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah Provinsi Bali harus bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan sumber pinjaman. Pemulihan Ekonomi: Pendapatan daerah kembali meningkat selama tahun 2022–2023 karena pembatasan sosial dilonggarkan dan sektor pariwisata mulai kembali berjalan. Namun, kinerja keuangan pemerintah provinsi Bali belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum pandemi dan masih menghadapi tantangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Tantangan Ke Depan: Untuk meningkatkan basis pendapatan daerah yang lebih beragam, pemerintah Provinsi Bali harus membuat rencana jangka panjang. Ini termasuk mengembangkan industri digital dan sektor lain yang lebih tahan terhadap pandemi atau krisis internasional. Untuk mencegah konsekuensi serupa di masa depan, manajemen anggaran yang lebih efektif dan terbuka harus menjadi prioritas utama. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali secara signifikan. Namun, berkat berbagai upaya pemulihan, kondisi keuangan mulai membaik seiring dengan pemulihan sektor ekonomi utama. Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana pandemi memengaruhi pendapatan, belanja, kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah. Provinsi Bali dan pemerintah daerah di dalamnya telah menunjukkan ketangguhan dalam mengelola keuangan daerah saat menghadapi turbulensi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Terlepas dari fakta bahwa mereka mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020, beberapa inisiatif kebijakan telah diambil untuk mengurangi dampaknya. Ada tanda-tanda pemulihan ekonomi pada tahun 2021, tetapi tahun 2022 akan menampilkan tantangan baru, karena pandemi berdampak langsung pada sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan pendapatan yang positif pada tahun 2019 telah tergantikan oleh penurunan tajam pada tahun 2020. Meskipun ada perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, strategi keuangan harus diperhatikan untuk mengatasi ketidakpastian yang masih berlanjut. Rasio kemandirian yang meningkat pada tahun 2022 menunjukkan kemajuan dalam upaya Provinsi Bali untuk mengurangi ketergantungannya pada transfer dan pinjaman. Meskipun demikian, perbedaan tingkat kemandirian di berbagai wilayah menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Rasio efektivitas yang tinggi sepanjang waktu menunjukkan pencapaian target pendapatan PAD dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun, perbedaan efektivitas di antara daerah menunjukkan betapa pentingnya menyesuaikan strategi yang khusus dengan situasi masing-masing. Rasio efisiensi yang cukup baik, terutama dalam PAD, menunjukkan upaya Provinsi Bali untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tingkat efisiensi yang konsisten dapat menjadi landasan untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Menurut analisis rasio aktivitas, ada konsentrasi yang signifikan pada belanja operasi, yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap keberlanjutan pelayanan publik. Terlepas dari itu, ada peluang untuk meningkatkan alokasi dana untuk belanja modal yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah daerah Provinsi Bali mengalami dinamika keuangan selama pandemi COVID-19. Dengan membuat strategi kebijakan yang tepat dan adaptif, Provinsi Bali dapat mengatasi tantangan ekonomi dan membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan..

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aini, D. N., Ningsih, P. A., & Rahma, S. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur*. JREA (Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi), 1(1), 125–140.
- [2] Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- [3] Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- [4] Aribowo, N. C., Damayanti, A. Y., & Bharata, R. W. (2023). *Analisis Manajemen Utang Terhadap Penilaian Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2022*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 6(1), 57–65.
- [5] Astria, T., & Ardiyanto, M. D. (2011). *Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, Dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- [6] Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). *Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- [7] Dewantara, R., & Nufitasari, D. (2021). *Politik Hukum Pengaturan Mengenai Tindakan Pencegahan Non Performing Loan Pada Bank Dalam Masa Pandemi Dengan Pendekatan Konsep Bifurkasi Hukum*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 66–83. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.176>
- [8] Dewi, R. (2018). *Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(4), 112-120.
- [9] Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19*. Riset Manajemen, 10, 1–20.
- [10] Halim, A. dan Kusufi M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] J. Aini, D. N., Ningsih, P. A., & Rahma, S. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur*. JREA (Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi), 1(1), 125–140.
- [12] Kurniasari, D. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- [13] Lantemona, I. A., Koleangan, R. A. M., & Walewangko, E. N. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Penyaluran Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 21(2), 30–43.
- [14] Loise, M. (2023). *Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 3(6), 4773–4782.
- [15] Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [16] Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- [17] Maria, E., Kristen, U., Wacana, S., & Halim, A. (2021). *E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- [18] McKinsey & Company. (2020). *The Future Of Business Post-COVID-19: Shifts In Consumer Behavior And Business Strategies*. Retrieved from <https://www.mckinsey.com>.
- [19] Moridu, I. (2021). *Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue of Banggai Regency*. Jurnal Sinar Manajemen, 08, 90–97.
- [20] Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman*. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- [21] Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara*. Ekonomis: Journal of Economics and Business. 6(1), 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- [22] Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Among Makarti, 15(1), 90–104. <https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246>
- [23] Putra, M. W., Darwis, D., & Priandika, A. T. (2021). *Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus: CV Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah)*. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v1i1.889>
- [24] PwC. (2021). *Global Financial Resilience During COVID-19 Pandemic*. Retrieved from <https://www.pwc.com>.
- [25] Rudianto, D. (2012). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Telkom, Tbk dengan PT. Indosat, Tbk Periode 2005-2010*. Jurnal Nasional: Universitas Bakrie Jakarta, ISSN, 2089-3590.
- [26] Sihombing, M., & Sihombing, N. (2020). *Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 16(2), 89-99.
- [27] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- [28] Venni, R., Ahmad, A. W., & Maryati, U. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021*. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 7(2), 1134. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1372>
- [29] Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2022). *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan*. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 1(1), 39–43.
- [30] Widasari, R., & Jahja, A. S. (2023). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat )*. BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(06), 1279–1289.
- [31] World Bank. (2021). *Small And Medium Enterprises In Crisis: Impact Of COVID-19 And Recovery Measures*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- [32] Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>

- [33] Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Sopiha, S. (2023). *Analisis Stabilitas Keuangan dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Pendekatan Teori Keagenan*. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 519–528. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.643>
- [34] Zaki, A., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan Article Information*. *Jekobs*, 2(1), 23–37.
- [35] Zulkarnain, Z. (2020). *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.